

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan proses kemajuan secara terus menerus dan berkesinambungan menuju kearah tujuan yang ingin dicapai. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah berperan sebagai mobilisator serta menciptakan suasana yang kondusif dan menunjang proses pembangunan. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama saling melengkapi dan saling mengisi demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu aspek ekonomi, politik, budaya dan ketahanan negara (GBHN, 2008).

Berdasarkan paradigma ekonomi konvensional terdapat dua tujuan pokok dari pembangunan ekonomi. Pertama, meningkatkan pendapatan riil per kapita. Kedua, menegakkan keadilan distribusi pendapatan (Huda, 2015). Namun jika dilihat fakta di lapangan justru masalah terbesar dalam perekonomian modern, khususnya di negara-negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat yang selanjutnya diperparah oleh tingkat kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin yang semakin lebar. Perekonomian hanya digerakkan oleh segelintir orang dan tentunya juga dinikmati oleh segelintir orang tersebut. Artinya adalah permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan ekonomi di antara sesama mereka.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah tersebut, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar

penduduk dan antar daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa prioritas dari pembangunan adalah menghapus kemiskinan.

Sementara dalam ajaran Islam fokus dan inti utama pembangunan adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya (Huda, 2015). Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktivitas pembangunan itu. Pemikiran ini berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (di akhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya.

Islam dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi tidak menafikan aspek pendapatan individu sebagai salah satu indikatornya. Karena Islam sangat mendambakan suatu masyarakat yang sejahtera secara materi agar mereka dapat melaksanakan kewajiban agamanya secara sempurna. Namun disisi lain Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara merata dan adil. Bahkan Islam menciptakan instrumen secara spesifik untuk mencapai distribusi tersebut melalui mekanisme zakat, infaq dan sedekah (ZIS) serta penumbuhan sifat kepedulian dan saling tolong-menolong di antara sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan komitmen individu terhadap agamanya. Artinya harus ada korelasi antara pembangunan ekonomi dengan peningkatan pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap agama. Tujuan akhir dari pembangunan ekonomi bukan seperti slogan ekonomi konvensional yang berbunyi "*homo economicus*" tapi justru terjadinya "*homo Islamicus*", yaitu individu yang berperilaku sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensional. Kemiskinan yang bersifat multidimensional dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskin aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan yang rendah. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber keuangan dan informasi.

Menurut (Fadilah & Agustin SD, 2016) factor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya pendapatan perkapita, pengangguran, modal manusia yang dilihat melalui IPM, dan pertumbuhan penduduk. Permasalahan kemiskinan menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan dapat ditanggulangi.

Campur tangan pemerintah lebih kurang sudah sering masyarakat dengar dan rasakan baik dalam tingkat nasional maupun daerah. Contoh dalam setiap kampanye pemilihan umum selalu tersodor rencana program penanggulangan kemiskinan, dalam realisasinya pun sudah pernah ada Bantuan Langsung Tunai/Sementara, BOS dalam bidang pendidikan, asuransi kesehatan masyarakat miskin, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri), Raskin (beras miskin), dan lainnya. Dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 27 sendiri sudah diamanatkan bahwa “tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Hal ini berarti pemerintah bertanggung jawab terhadap masalah kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah masalah kemiskinan yang di alami oleh setiap warga negaranya.

Salahsatu factor yang mempengaruhi kemiskinan dalam penelitian ini adalah PDRB. Menurut (Damanik & Sidauruk, 2020) PDRB suatu wilayah yang tinggi menandakan wilayah tersebut memiliki perekonomian yang baik.

Sebaliknya, PDRB suatu wilayah yang rendah menandakan perekonomian wilayah tersebut tidaklah dalam keadaan baik. Perekonomian yang dimaksud yaitu perekonomian yang dapat menunjang kehidupan masyarakat sehingga tidak terjadi kemiskinan. PDRB suatu wilayah tinggi apabila wilayah tersebut dapat mengoptimalkan potensi wilayahnya sendiri dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang memadai. PDRB yang tinggi akan menekan tingkat kemiskinan, karena dengan tingginya PDRB pembangunan dapat dioptimalkan, sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, PDRB yang rendah akan meningkatkan jumlah kemiskinan dalam masyarakat, karena pembangunan yang dilakukan dalam menyejahterakan masyarakat tidak optimal.

Sumber daya manusia memiliki peran penting dari terciptanya sebuah pembangunan, yaitu pembangunan yang bertujuan menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan dapat menjalankan kehidupan yang produktif. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, sumber daya manusia harus dapat berkembang dan mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Dalam arti sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembangunan memiliki berbagai kompleksitas masalah. Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik aspek ekonomi, politik, sosial, maupun budaya (Yunita, 2012).

Human Development Report (HDR) menafsirkan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Pilihan yang dimaksud dan yang paling penting diantaranya yaitu pilihan untuk berumur panjang dan sehat, pilihan untuk berilmu pengetahuan, dan pilihan

untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (Chapra , 2008).

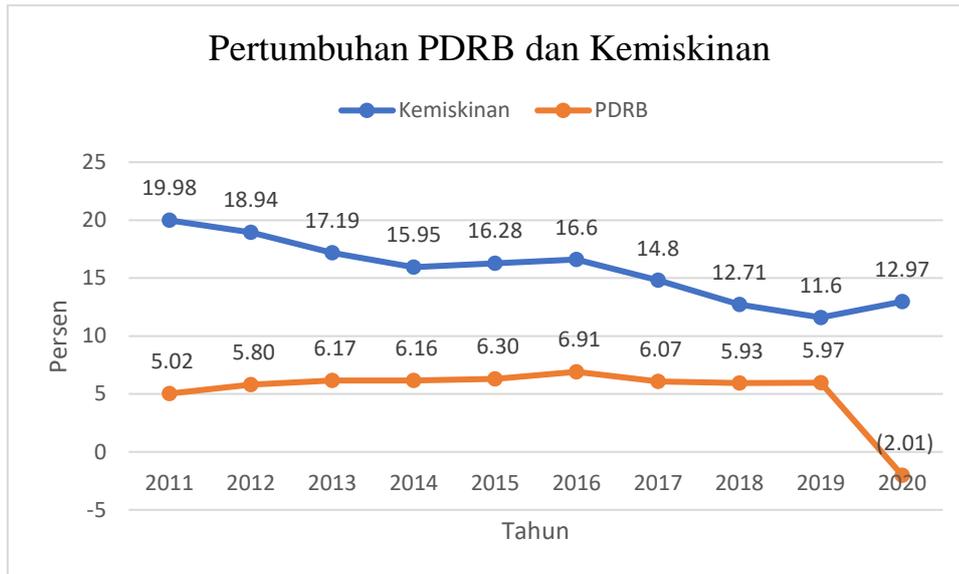
Berdasarkan data sekunder yang diperoleh penulis dari BPS Kota Tasikmalaya, jumlah penduduk miskin dan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Tasikmalaya mengalami perubahan dari tahun 2011 sampai 2020 secara fluktuasi yang ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 1. 1
Pertumbuhan Penduduk Miskin dan PDRB Kota Tasikmalaya, 2011-2020

Tahun	Kemiskinan (%)	PDRB (%)
2011	19.98	5.02
2012	18.94	5.80
2013	17.19	6.17
2014	15.95	6.16
2015	16.28	6.30
2016	16.6	6.91
2017	14.8	6.07
2018	12.71	5.93
2019	11.6	5.97
2020	12.97	(2.01)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya 2022

Selain itu data kemiskinan dan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2011 sampai 2020 juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya 2022 (data diolah peneliti)

Grafik 1. 1
Pertumbuhan Kemiskinan dan PDRB Kota Tasikmalaya, 2011-2020

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB di Kota Tasikmalaya pada tahun 2011-2020 cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2011-2017 dan mengalami penurunan dari 2017-2020. Kemudian untuk pertumbuhan penduduk miskin fluktuatif dari tahun 2011-2020 namun lebih cenderung menurun.

Akan tetapi bisa kita lihat pada grafik diatas, bahwa ada beberapa data paradoks pada tahun tertentu dimana disana terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan dilapangan. Seperti pada tahun 2014 PDRB turun 0,01% akan tetapi pertumbuhan penduduk miskin ikut turun sebesar 1,24%, sedangkan semestinya ketika PDRB naik, pertumbuhan penduduk miskin harus turun. Begitupun juga terjadi pada tahun 2017 dan 2018 dimana nilai PDRB turun masing-masing 0,84% dan 0,14% sedangkan kemiskinan ikut turun masing masing sebesar 1,8% dan 2,09%. Terjadi juga sebaliknya pada tahun 2015 dan 2016 dimana nilai PDRB naik

masing-masing sebesar 0,14% dan 0,61% akan tetapi angka kemiskinan ikut naik masing masing sebesar 0,33% dan 0,32%.

Meskipun perkembangan perekonomian yang terjadi di Kota Tasikmalaya ditandai dengan angka PDRB telah membawa perbaikan pada kondisi pendapatan penduduknya, namun secara umum peningkatan tersebut masih berada di bawah pendapatan Provinsi Jawa Barat. Pendapatan rata-rata penduduk (yang diukur dari PDRB perkapita berdasarkan tahun dasar 2011) mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 15,14 miliar per tahun pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp. 23,23 miliar per tahun pada tahun 2020. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan dibanding pendapatan Jawa Barat yang besarnya mencapai Rp. 966 miliar di tahun 2011 dan Rp. 1,5 Triliun pada tahun 2021 atau dengan tingkat kontribusi masing masing sebesar 1,01% pada tahun 2011, dan 1,06% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendapatan rata-rata masyarakat Kota Tasikmalaya masih berada dibawah pendapatan rata-rata masyarakat Jawa Barat.

Sedangkan Berikut ini merupakan data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan penduduk miskin Kota Tasikmalaya dari tahun 2011-2020:

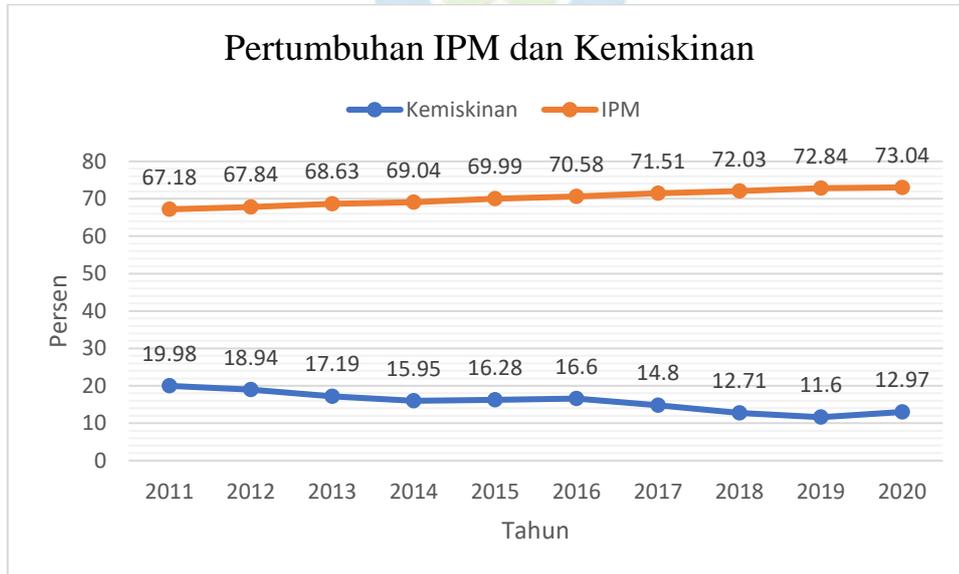
Tabel 1. 2

Pertumbuhan IPM dan Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya, 2011-2020

Tahun	IPM (Persen)	Kemiskinan (Persen)
2011	67.18	19.98
2012	67.84	18.94
2013	68.63	17.19
2014	69.04	15.95
2015	69.99	16.28
2016	70.58	16.6
2017	71.51	14.8
2018	72.03	12.71
2019	72.84	11.6
2020	73.04	12.97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya 2022

Selain itu, data pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya dari tahun 2011-2020 juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya 2022 (data diolah peneliti)

Grafik 1. 2

Perkembangan IPM dan Penduduk Miskin Kota Tasikmalaya, 2011-2020

Berdasarkan grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2011 hingga tahun 2020 cenderung mengalami peningkatan, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,86% selama sepuluh tahun data penelitian. Hal ini menjadi pencapaian positif Kota Tasikmalaya yang mampu meningkatkan angka IPM diatas tingkat rata-rata IPM Provinsi Jawa Barat yang sebesar 5,42% selama 10 tahun data penelitian.

Adapun bisa kita lihat pada grafik diatas, dimana terdapat data paradoks yang tidak sesuai dengan semestinya (teori). Pada tahun 2015 ketika IPM naik sebesar 0,59%, akan tetapi angka kemiskinan ikut naik yaitu sebesar 0,33% dari 15,95% menjadi 16,28%. Begitupula terjadi pada tahun 2016 dan 2020, dimana nilai IPM naik masing masing 0,93% dan 0,27%, sedangkan angka kemiskinan juga malah ikut naik masing-masing sebesar 0,32% dan 1,37% dari 16,28% 2015 dan 11,6% 2019 menjadi 16,6% 2016 dan 12,97% 2020.

Menurut BAPPENAS (Badan Perencana Pembangunan Nasional), indeks pembangunan manusia memiliki peran sebagai ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks pembangunan manusia dengan metode baru dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta besarnya pengeluaran masyarakat untuk dikonsumsi sejumlah kebutuhan pokok yaitu pengeluaran per kapita sebagai pendekatan yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pembangunan untuk hidup yang layak. Dimulainya perhitungan indeks pembangunan manusia dengan metode baru yaitu pada tahun 2010 sampai sekarang.

Tabel 1. 3
Komponen IPM Kota Tasikmalaya, 2011-2020

Tahun	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita
2011	70.81	12.24	8.28	7908.00
2012	70.87	12.66	8.34	8013.00
2013	70.93	13.11	8.44	8157.00
2014	70.96	13.36	8.51	8210.00
2015	71.26	13.37	8.56	8785.00
2016	71.37	13.40	8.63	9145.00
2017	71.48	13.41	9.03	9497.00
2018	71.70	13.42	9.04	9855.00
2019	71.93	13.44	9.13	10414.00
2020	72.15	13.45	9.33	10263.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya 2022 (data diolah peneliti)

Dilihat menggunakan kaca mata tiga aspek pembentuk IPM, maka kenaikan IPM tahun 2020 di Kota Tasikmalaya disebabkan oleh kenaikan pada aspek Umur Harapan Hidup (UHH) dan aspek pendidikan. UHH masyarakat Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan dari tahun 2011 hingga tahun 2020 sebesar 1,97 tahun menjadi 72,15 tahun dari sebelumnya di angka 70,81 tahun. Trennya dalam sepuluh tahun terakhir penelitian terus mengalami kenaikan. Pada 2011 angka UHH Kota Tasikmalaya berada di bawah 71 tahun. Di sektor pendidikan, terjadi kenaikan baik dari sisi Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Tahun 2020 indikator HLS masyarakat Kota Tasikmalaya naik 1,21 tahun. Sementara untuk RLS naik 1,05 tahun. Namun kondisi ekonomi yang jatuh ke jurang resesi pada tahun 2020 membuat pengeluaran per kapita masyarakat justru turun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran per kapita masyarakat Kota Tasikmalaya turun Rp 151.000 dibanding tahun lalu 2019. Pada 2020 pengeluaran per kapita masyarakat Kota Tasikmalaya berada di Rp 10,26 juta,

sedangkan di tahun lalu mencapai Rp 10,42 juta. Resesi ekonomi terjadi secara nasional akibat pandemi Covid-19 menyebabkan pendapatan masyarakat Kota Tasikmalaya tergerus.

Mengacu kepada berbagai uraian tersebut maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kemiskinan di Kota Tasikmalaya dengan membuat penelitian yang berjudul *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap tingkat Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Tasikmalaya Tahun 2011 - 2020.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya periode 2011-2020?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya periode 2011-2020?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya 2011-2020?
4. Bagaimana analisis penanggulangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan dalam perpektif ekonomi syariah di Kota Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya periode 2011 – 2020.
2. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial terhadap tingkat kemiskina di Kota Tasikmalaya periode 2011 – 2020.
3. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya tahun 2011 – 2020.
4. Untuk menganalisis penanggulangan Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto dan Indek Pembangunan Manusia jika dilihat dari sudut pandang ekonomi syariah?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan baru bagi penulis mengenai bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kota Tasikmalaya dari 2011-2020.

- b. Bagi Pihak Lain

- 1) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berupa kontribusi pemikiran yang dapat digunakan pemerintah daerah

dalam mengambil kebijakan fiskal, sehingga angka kemiskinan dapat terkendali.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi berupa pedoman dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang akan dilakukan dimasa depan mengenai topik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Independen (bebas) yang digunakan pada penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Tasikmalaya yang terlampir di website resmi badan pusat statistik Kota Tasikmalaya.
2. Variable dependen (terikat) pada penelitian ini yaitu tingkat kemiskinan yang tercatat dan dipublikasikan di situs resmi badan pusat statistik Kota Tasikmalaya selama sepuluh tahun dari 2011-2020